

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN merupakan kerjasama regional yang didirikan oleh lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura berdasarkan kesepakatan bersama pada 8 Agustus 1967 yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok 1967. Walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal bahasa, budaya, agama, dan geografi pengalaman sejarah namun lambat laun semakin menumbuhkan rasa kepercayaan. Masa awal pendirian Asean lebih diwarnai oleh upaya-upaya membangun rasa saling percaya di antara anggotanya untuk mengembangkan kerjasama yang lebih baik. Perkembangan keamanan nasional dan internasional kawasan ASEAN mengalami perkembangan yang pesat kerjasama ASEAN mulai menyentuh segala aspek tidak hanya permasalahan ekonomi dan sosial budaya namun Asean mulai merambah bidang yang dianggap sensitif oleh negara Asean yaitu bidang politik dan keamanan, hal ini tidak lepas dari perkembangan lingkungan domestik dan internasional sehingga membentuk pola-pola kerjasama antar anggota ASEAN¹.

¹<http://kajiankritik.blogspot.com/2011/05/peran-indonesia-dalam-asean.html> diakses pada tanggal 05 Maret 2015 jam 17.15 WIB

Pembentukan ASEAN tidak lepas dari peran Soeharto yang cenderung mengedepankan politik luar negeri bertetangga baik, masa orde baru berupaya melakukan pencitraan yang tidak agresif, dimana Indonesia pada pemerintahan orde lama yang memilih politik konfrontasi dengan Malaysia yang di anggap sebagai negara kepanjangan kolonial Inggris, setelah lengsernya Soekarno pada tahun 1967. Soeharto mengambil alih kekuasaan dan melakukan reformasi kebijakan dengan menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Soeharto yang menginginkan pembangunan ekonomi nasional dengan mendukung kerjasama regional. dan menginginkan kawasan yang damai dimana tidak ada adanya perang. Sehingga Indonesia dalam pertemuan dengan negara-negara pendiri Asean, ialah Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura di Bangkok Indonesia yang diwakili Adam Malik merencanakan pembentukan organisasi kawasan agar terciptanya kawasan yang stabil dan damai².

Sebagai negara yang besar dikawasan Asia Tenggara pengaruh kebijakan luar negeri Indonesia tentu sangat signifikan terhadap organisasi regional kawasan yaitu ASEAN. Indonesia sendiri dalam kebijakan luar negerinya berpegang pada kebijakan luar negeri "*bebas aktif dalam artian*" : Politik luar negeri yang kita anut bukan menjadikan Indonesia netral terhadap suatu permasalahan melainkan

².Handayani."ASEAN Community". 07 November 2014
<http://tegerbangun366.blogspot.com/2010/02/tiga-pilar-asean-community-komunitas.html> 21:16

suatu Politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri hanya pada satu kekuatan dunia. Aktif berarti kita ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun keikutsertaan kita secara aktif dalam menyelesaikan berbagai konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, seperti yang tertera dalam Pembukaan UUD 45 yaitu agar terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai pelaksanaan dari kebijakan nasional, Politik luar negeri dilaksanakan melalui diplomasi oleh para diplomat, baik yang berada di berbagai Perwakilan di luar negeri maupun dalam negeri.

Latar belakang *ASEAN Community* adalah dorongan terhadap motivasi ekonomi. Ditambah dengan faktor eksternal yang ada yaitu negara China memiliki perkembangan ekonomi yang sangat cepat dan signifikan. Setelah melihat keadaan ekonomi China yang sangat pesat pertumbuhannya, hal ini membuat negara-negara di Asia Tenggara ingin bersatu dan membangun kerja sama regional untuk kemajuan seluruh anggota di negara asia tenggara yang tergabung. Kerja sama regional ini juga terinspirasi dari Uni Eropa yang notabenehnya telah berhasil menjadi kekuatan besar bagi setiap negara yang tergabung didalamnya bersatu dengan satu sama lain, sehingga dapat menyeimbangi kekuatan negara adidaya Amerika Serikat³.

³<http://andrigilang.wordpress.com/2010/12/01/arti-penting-keketuaan-indonesia-di-asean-2011-dalam-bidang-perdagangan/> diakses pada tanggal 03 Maret 2015

Ada tiga pilar utama dari ASEAN Community ini, yaitu *ASEAN Security Community* (Komunitas Keamanan ASEAN) disingkat ASC, *ASEAN Economic Community* (Komunitas Ekonomi ASEAN) disingkat AEC, dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (Komunitas Sosial Budaya ASEAN) disingkat ASCC. Ketiga pilar tersebut merupakan prasyarat utama yang dianggap mampu menerjemahkan visi integrasi ASEAN sebagaimana amanat *ASEAN Vision 2020*⁴.

Adapun kerangka umum Bali Concord II yang berisi pembentukan ASEAN Community tersebut menggariskan bahwa ;

*An ASEAN Community shall be established comprising three pillars, namely political and security cooperation, economic cooperation, and socio-cultural cooperation that are closely intertwined and mutually reinforcing for the purpose of ensuring durable peace, stability and shared prosperity in the region*⁵.

Kerangka tersebut secara tegas mengupayakan suatu pendekatan yang dibangun untuk mewujudkan ASEAN yang damai, stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya menjadi bidang prioritas dan vital untuk menuju Komunitas ASEAN.

Setidaknya ada beberapa latar belakang yang menjadikan *ASEAN Security Community* sebagai pilar pertama dalam kerangka *ASEAN Community* yakni untuk menjamin ASEAN mengatur stabilitas keamanan regional oleh para negara anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan serta menangkal pengaruh

⁴<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18900/1/NABIL%20AHMAD%20FAUZI-FUF.pdf> diakses pada tanggal 15 Juli 2015 jam 13:00

⁵S. Pusphanathan, "The Establishment of ASEAN Community for the Future of ASEAN", h. 1.

kekuatan negara-negara besar luar kawasan (Amerika Serikat, Cina, Australia dan Rusia) secara langsung. Selain itu, *ASEAN Security Community* akan semakin memperkuat posisi ASEAN dalam konstelasi geopolitik internasional.

Dalam kaitan yang lebih luas, meminjam pendapat Juwono Sudarsono, “era pasca-Perang Dingin”, “globalisasi ekonomi” dan “Dunia Tanpa Tapal Batas”, masalah-masalah perimbangan kekuatan militer antar bangsa tetap menjadi sentral dalam hubungan internasional menuju abad-21⁶. Oleh karena itu kerjasama keamanan kawasan diperlukan untuk mengimbangi kepentingan nasional negara anggota ASEAN dalam membangun pertahanan dan persenjataan domestiknya. Selain itu untuk menjamin setiap penyelesaian permasalahan dalam lingkup ASEAN diselesaikan tidak dengan pendekatan militer.

Unsur ekonomi yang diwujudkan dalam *ASEAN Economic Community* merupakan elemen lain yang juga penting. Pertama, untuk mempercepat langkah meminimalisir jurang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antar negara anggota yang masih besar. Kedua, memperkuat pertahanan ekonomi kawasan agar tidak mengulangi krisis ekonomi tahun 1997 yang dipicu oleh krisis mata uang Thailand yang dengan mudahnya menyebar kesemua negara di Asia Tenggara. Tuntutan untuk terintegrasi terhadap pasar bebas dunia juga menjadi motivasi utama kerjasama ekonomi ini.

⁶James Luhulima, *Asia Tenggara*, h. viii.

Sedangkan aspek *ASEAN Socio-Cultural Community* dalam *ASEAN Community* diperlukan dalam upaya mempercepat visi integrasi ASEAN. Kedekatan sosial budaya yang dibangun di tingkatan elit diharapkan mampu berdampak pada integrasi sosial budaya pada level masyarakat (*civil society*) dari negara-negara anggota. Selama ini, kurangnya rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa kekitaan (*we feeling*) dari masyarakat negara-negara anggota ditengarai sebagai faktor lambatnya perkembangan kerjasama integrasi ASEAN.

Sejak awal, ada tiga alasan utama yang melatarbelakangi berdirinya perhimpunan tersebut, yakni keinginan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan kebudayaan kawasan melalui program-program kerjasama; menjaga stabilitas politik dan ekonomi kawasan dari rivalitas negara besar; menyediakan forum bagi penyelesaian perbedaan-perbedaan intra-regional⁷.

Pada awalnya, terlihat motivasi politik yang sangat besar melatarbelakangi berdirinya ASEAN ini, namun para negara pendiri masih terlalu riskan untuk menempatkan masalah politik dan keamanan dalam mainstream kebijakan perhimpunan. Hal mendasar yang melandasi sikap kehati-hatian ini adalah masalah politik dan keamanan masih merupakan hal yang terlalu sensitif. Pasalnya ini akan menyentuh masalah vital di mana beberapa negara pendiri baru memulihkan hubungan diplomatiknya. Selain itu, perbedaan perspektif dalam menyikapi kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Asia Tenggara

⁷*Ibid.*, h.35.

masih menjadi persoalan penting. Sehingga dikhawatirkan pembahasan yang terlalu berat dalam wilayah politik dan keamanan dapat mengancam kelangsungan hidup ASEAN yang masih baru.

Pengalaman negara-negara ASEAN yang selama puluhan tahun “*dipermainkan*” oleh negara luar kawasan, menjadi titik awal kesadaran negara – negara ASEAN untuk menciptakan kerjasama kawasan yang lebih konkret. Hal ini diwujudkan dengan lahirnya konsep *ASEAN Security Community*, di mana tema politik dan keamanan menjadi isu sentral.

Selain itu, badai krisis ekonomi yang menerjang Asia Tenggara pada tahun 1997 juga menyadarkan ASEAN bahwa diperlukan suatu kerjasama yang erat dalam bidang ekonomi. Kesadaran akan Pasar Tunggal ASEAN sebagai wujud respon negara-negara anggota dalam menghadapi globalisasi juga menjadi alasan penting. Oleh karena itu, lahirlah gagasan pembentukan *ASEAN Economic Community*.

Terlebih, eksistensi ASEAN masih menjadi komoditas para elit politik negara-negara anggota. Hal ini menjadikan ASEAN tidak mengakar dalam kehidupan sosial budaya masyarakat negara anggota. Karena itu pembentukan *ASEAN Socio-Cultural Community* menjadi sangat penting. Ketiga faktor di atas menjadi pilar dalam kerangka pembentukan *ASEAN Community*, di mana hal ini menjadi sebuah keniscayaan dalam peta konstelasi sosial politik dunia internasional kontemporer.

Dalam perspektif yang lebih khusus, proses pembentukan *ASEAN Community* ini merupakan bagian penting dalam ranah politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN. Peran Indonesia dalam hal ini sangat besar, dengan menjadi pelopor pembentukan *ASEAN Community* ini. Hal ini terbukti di mana kelahiran Bali Concord II pada KTT ASEAN IX di Bali diawali dengan konsep *ASEAN Security Community* yang digagas oleh Indonesia.

Manuver Indonesia yang sejak awal menggagas terbentuknya *ASEAN Security Community* menjadi fenomena tersendiri. Terlebih gagasan Indonesia ini kemudian menggelinding menghasilkan multiplier effect. Terbukti dengan terwujudnya kepakatan *ASEAN Community* dalam *Bali Concord II*. Bahkan hingga kini, Indonesia masih tetap fokus untuk mengawal pengembangan dan pembangunan *ASEAN Community* dalam bingkai *ASEAN Charter (Piagam ASEAN)* dalam forum-forum regional⁸. Maka muncul beberapa pertanyaan, yakni peran dan kepentingan apa yang melandasi manuver politik luar negeri Indonesia tersebut.

⁸ASEAN Charter merupakan penyempurnaan dari ASEAN Community. Piagam ASEAN ini merupakan pijakan hukum atau yuridiksi internasional bagi negara-negara anggota ASEAN. Piagam ini ditandatangani pada KTT ASEAN di Singapura tahun 2007 lalu. Dian Triansyah Djani, "The Future of ASEAN Regional Cooperation After the 40th Anniversary", h. 6.

Oleh karena itu, fenomena yang menarik ini penulis ingin meneliti secara akademik dengan mengajukan judul skripsi yaitu : **“POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENDORONG PROSES TRANSFORMASI ASEAN MENJADI ASEAN COMMUNITY 2015”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian skripsi adalah :Bagaimana politik luar negeri indonesia dalam mendorong proses transformasi ASEAN menjadi ASEAN Community 2015

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian skripsi adalah :Untuk mengetahui politik luar negeri Indonesia dalam mendorong proses transformasi ASEAN menjadi ASEAN Community 2015

D. Kerangka dasar teori

D.1 : Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan sebuah komponen penting dalam pemerintahan suatu negara. Hal ini lebih disebabkan kebijakan politik luar negeri suatu negara berdimensi ganda, yakni; dimensi domestik dan negara lain. Karena

itu, studi politik luar negeri atau hubungan internasional berdimensi luas yang meliputi dimensi politik, ekonomi dan sosial budaya.

Pada dasarnya, politik luar negeri merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan internasional. Dari dimensi nasional, dukungan rakyat merupakan prasyarat bagi presiden dalam mengemudikan politik luar negeri⁹. Namun seringkali otoritas presiden melebihi legitimasi publik dalam penentuan kebijakan luar negeri. Hal ini kemudian melahirkan gap besar antara kebijakan dengan legitimasi publik yang berdampak lemahnya dukungan masyarakat.

Selain itu, politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang telah diformulasikan sedemikian rupa oleh satu pihak (*dalam hal ini state*) untuk memperjuangkan dan mencapai kepentingan nasional satu pihak¹⁰. Dalam konsep Holsti¹¹, pokok dalam membuat politik luar negeri pada umumnya dititik beratkan pada usaha untuk memecahkan berbagai persoalan, baik yang berhubungan dengan masalah dalam maupun luar negeri dan diwujudkan melalui

⁹Hans. J. Morgenthau, *Politik Antar-Bangsa*, terj.S. Maimoen (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 225.

¹⁰Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations: Frameworks for Understanding*, (Boston: Allyn & Bacon, 1997), p. 134.

¹¹K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa*,(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987), h. 175-176.

berbagai cara yang bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya yang direfleksikan melalui perumusan kebijakan politik luar negerinya. Sehingga menurutnya, kebijakan luar negeri dibuat sebagai suatu reaksi negara terhadap lingkungan eksternal, keseimbangan dan ketidakseimbangan semua unit dalam sistem.

Berdasarkan hal tersebut, setiap kebijakan luar negeri yang dibuat sebuah negara akan bersifat spesifik dan tentunya sesuai dengan kebutuhan negara. Sebagaimana akan penulis paparkan dalam BAB III penelitian ini, langkah Indonesia mengusung pembentukan *ASEAN Security Community* yang berkembang menjadi *ASEAN Community* merupakan implementasi dari pendapat tersebut.

Dalam konteks lain, kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional¹². Menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (*internal life*) dan kebutuhan eksternal (*eksternal needs*)¹³.

¹²ack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (Bandung: Abardin, 1999), h. 5.

¹³A. A. Banyu Perwita dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosda Karya, 2005), h. 49.

Politik luar negeri merupakan dua komponen yang berbeda tetapi membentuk sebuah pengertian umum. Memahami konsep politik luar negeri dapat dielaborasi dengan jalan memisahkannya dalam dua komponen: politik dan luar negeri.

Politik atau kebijakan (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah diterapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep "pilihan (*choices*)": memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep "*wilayah*" akan membantu dalam upaya memahami konsep politik luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (*dalam*) yang dimiliki suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan keluar wilayah suatu negara¹⁴.

Dengan kata lain, studi politik luar negeri berada intersection (*persilangan*) antara aspek dalam negeri suatu negara (*domestik*) dan aspek internasional (*eksternal*) dari kehidupan suatu negara¹⁵. Pengaruh proses persentuhan atau persilangan ini merupakan substansi dari perumusan kebijakan politik luar negeri, di mana pemerintahan dituntut untuk dapat mengkompromikan kepentingan domestik dengan kepentingan internasional di sisi lain.

¹⁴Banyu Perwita dan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, h.48.

¹⁵*Ibid.*, h. 48.

Dengan menggunakan teori analisa politik luar negeri *James N. Rosenau* dan *Gavin Boyd*, ada empat faktor sumber yang secara umum yang telah meliputi dimensi internal dan eksternal. Sumber-sumber utama yang menjadi input dalam perumusan kebijakan luar negeri, yaitu: pertama, sumber sistemik (*systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk antara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis. Kedua, sumber masyarakat (*societal sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah, pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik.

Ketiga, sumber pemerintahan (*governmental sources*) merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggung jawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Keempat, sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*) merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri¹⁶. Keempat faktor dalam terminologi Rosenau dan Boyd tersebut merupakan faktor-faktor yang tampak dalam menganalisis politik luar negeri suatu negara. Beberapa faktor akan terlihat dominan di atas faktor lainnya.

¹⁶*Ibid.*, h. 57.

Dengan demikian, politik luar negeri suatu negara ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negaranya. Kemudian politik luar negeri dalam aspeknya yang dinamis adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara lain. Ia termasuk jumlah keseluruhan hubungan luar negeri suatu bangsa. Penyusunan politik luar negeri mungkin merupakan fungsi politik paling tinggi dalam suatu negara. Kesalahan dalam perumusannya bisa membawa pada akibat yang paling serius. Karena itu, perumusan politik luar negeri telah menjadi hak prerogatif pimpinan eksekutif suatu negara¹⁷. Namun demikian, beberapa perkembangan kontemporer menggariskan keterlibatan unsur pimpinan negara lainnya serta peran partisipatif dari publik turut serta mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri.

D.2 : Teori Regionalisme Kawasan

Regionalisme merupakan suatu kebijakan dan *state project* dimana negara dan aktor non-negara bekerjasama dan mengkoordinasikan strategi demi mencapai kepentingan dalam suatu kawasan tertentu. Tujuan dari regionalisme adalah untuk mengupayakan dan mempromosikan tujuan-tujuan bersama dalam satu isu atau lebih. Meskipun dalam perkembangannya regionalisme selalu disertai anomali dinamika spesifik dalam tatanan geografis, politik, ekonomi, strategis, dan budaya di suatu kawasan, namun regionalisme juga

¹⁷S.L. Roy, *Diplomasi*(Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 33

berkembang dengan disertai norma-norma, tren, dan nilai-nilai tertentu yang berlaku pada konstelasi kawasan¹⁸. Dengan difasilitasi oleh norma-norma bersama, institusi domestik dan interdependensi tingkat tinggi, negara di dalam sebuah komunitas regional mempunyai kecenderungan untuk bergabung dalam komunitas tersebut (*terutama komunitas keamanan*) dan mengharapkan perubahan secara damai. Negara melihat diri mereka sebagai fundamental terkait dengan negara-negara lain, terikat oleh norma-norma umum, pengalaman politik, dan lokasi regional yang saling berdekatan¹⁹.

Regionalisme sendiri memiliki perjalanan sejarah yang panjang, dimana isu regional ini pertama kali muncul pada Perang Dunia I, antar negara-negara Eropa yang saling berkoalisi satu sama lain untuk menumbangkan lawannya dalam arena perang. Karena sesungguhnya jika dilihat dari para aktor negara yang terlibat dalam Perang Dunia I, perang tersebut tidak dapat dikategorikan pada perang besar mencakup seluruh dunia, namun hanya sebuah perang antar negara Eropa yang berebut wilayah jajahan dan kehormatan bangsanya. Isu regionalisme ini kemudian berlanjut pada banyak organisasi sekawasan setelah Perang dunia II, yang dibuktikan dengan berdirinya Liga Arab dan Eropa Barat²⁰. Kemudian pengaplikasian pembentukan organisasi sekawasan ini dilanjutkan dengan

¹⁸Louise Fawcett, "Regionalism from Historical Perspective", dalam Mary Farrel, *et.al.* (2005) *Global Politics of Regionalism*. London: Pluto Press, hal. 24.

¹⁹G. John Ikenberry, Jitsuo Tsuciyama, (2002), "Between Balance Of Power And Community: The Future of Multilateral Security Cooperation In The Asia Pacific", *International Relations of The Asia Pacific* 2(1): 88.

²⁰M Griffiths dan T O'Callaghan, (2002), *International Relations: The Key Concepts*, London: Routledge. Hal 59.

berdirinya banyak organisasi- organisasi di Asia, diantaranya ASEAN, Asia Timur, Asia Tengah, dll.

Dalam tulisan *Maurice Schiff dan L. Alan Winters* yang berjudul "*Regional Integration and Development*"²¹. Dijelaskan bahwa memang fenomena integrasi regional telah menjadi perkembangan utama dalam hubungan internasional dalam beberapa tahun terakhir, di mana secara virtual semua negara saat ini merupakan anggota dari minimal satu blok. Perjanjian regional sangat luas cakupannya, namun semuanya memiliki tujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara anggota, yang berdampak pada adanya diskriminasi perdagangan dengan negara lain. Dalam bentuk paling sederhana, perjanjian ini hanya menghilangkan tarif dalam perdagangan barang, namun banyak juga yang bergerak lebih jauh dengan meliputi penghilangan hambatan non tarif dan untuk memperluas liberalisasi untuk investasi dan berbagai kebijakan. Dalam bentuk yang rumit, terdapat tujuan untuk membentuk kesatuan ekonomi dan terlibat dalam konstruksi dari penyatuan institusi eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Tulisan yang kedua yaitu tulisan dari *William D. Coleman dan Geoffrey R.D. Underhill* yang berjudul "*Domestic politics, regional economic co-operation and global economic integration*"²². Coleman dan Geoffrey memulai tulisan ini dengan menyatakan bahwa integrasi ekonomi global merupakan salah satu

²¹<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318699-S-PDF-Gayatri%20Marisca%20Permata%20Sari.pdf> diakses pada tanggal 25 September jam 18:00 WIB

²²William D. Coleman and Geoffrey R.D. Underhill, *Domestic politics, regional economic co-operation and global economic integration, dalam Regionalism and Global Economic Integration: Europe, Asia, and the Americas*, (New York: Routledge, 1998), hal. 21

perkembangan yang paling menonjol di abad 20. Liberalisasi dari ekonomi domestik, penguatan dari rezim kerjasama di perdagangan dan finansial internasional, dan transnasionalisasi struktur korporasi berkontribusi untuk mempercepat pertumbuhan dari struktur pasar yang terintegrasi secara global.

Berbagai faktor yang mendorong terjadinya integrasi regional, antara lain pemahaman untuk berdagang dengan tetangga lebih dahulu baru kemudian bergerak lebih jauh, adanya persamaan pengalaman sejarah antar negara di kawasan tertentu membangun kedekatan, dan persamaan kebudayaan yang memfasilitasi perdagangan dengan tetangga lebih dahulu baru kemudian dengan pihak yang lebih jauh. Namun dikatakan yang paling penting dari semua yang terjadi adalah mengenai kecenderungan untuk memformalisasikan pola regional ini ke dalam rangkaian pengaturan kerjasama untuk memfasilitasi inetgrasi ekonomi. Tentu saja dari semua fenomena integrasi yang terjadi, Uni Eropa merupakan pembahasan yang paling menarik dikarenakan keberhasilannya mencapai mata uang tunggal.

Mengenai alasan dari mengapa fenomena regionalisme menjadi semakin berkembang dan menjadi pilihan yang menarik bagi pemerintah dibahas Ravenhill²³ menjadi ke dalam dua pembagian besar yaitu alasan yang berlandaskan motif politik dan alasan yang berlandaskan motif ekonomi. Untuk motif politik dari regionalisme yaitu yang pertama kerjasama ekonomi dan

²³<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318699-S-PDF-Gayatri%20Marisca%20Permata%20Sari.pdf> diakses pada tanggal 25 September jam 18:00 WIB

membangun kepercayaan diri. Ravenhill menjelaskan bahwa regionalisme seringkali meliputi penggunaan ekonomi sebagai tujuan politik, seperti peningkatan hubungan antar-negara dan atau penguatan keamanan di dalam kawasan. Dalam hubungan internasional di mana terdapat sejarah dari konflik, atau di mana tidak terdapat tradisi untuk bekerjasama, kerjasama dalam kepentingan ekonomi dapat menjadi elemen utama dari proses membangun kepercayaan diri.

Alasan yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional dan agenda keamanan baru. Dalam beberapa tahun belakangan ini negara industri memperluas kerjasama ekonomi regional ke negara tetangga mereka yang kurang berkembang dengan pertimbangan ancaman keamanan non-tradisional yang berasal dari negara kurang berkembang tersebut. Contoh ancaman yang ada yaitu perusakan lingkungan, migrasi ilegal, kejahatan transnasional, penyelundupan obat-obatan, dan terorisme internasional. Kerjasama regional dilihat dapat membantu mengatasi masalah ini secara langsung.

Alasan yang ketiga yaitu regionalisme sebagai alat tawar menawar. Kebanyakan perjanjian ekonomi regional yang dibangun oleh negara-negara berkembang pada tahun 1970 dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat kekuatan tawar menawar mereka dengan korporasi transnasional dan dengan mitra dagang mereka. Kerjasama regional juga dapat memperkuat *bargaining power* dengan aktor eksternal. Negara-negara miskin juga menggunakan kerjasama regional sebagai sarana untuk mendapatkan dana bantuan lebih dari

negara dan organisasi donor. Selama beberapa tahun belakangan negara-negara maju dan organisasi internasional telah mendorong negara-negara berkembang untuk melakukan integrasi regional, dan telah menetapkan dana bantuan untuk diberikan dengan tujuan mendukung proyek regionalisasi negara-negara berkembang. Uni Eropa, merupakan pendukung antusias dari terjadinya regionalisme antar negara-negara berkembang, dengan menyediakan bantuan finansial dan teknis. Terlebih lagi dinyatakan oleh Bank Dunia bahwa dengan mengumpulkan sumber daya diplomatis dalam pengaturan regional, negara-negara miskin terkadang dapat mencapai pencapaian yang besar dalam hubungan internasional, di mana mereka dapat menegosiasikan sesuatu yang tidak akan mereka capai jika mereka bertindak secara individu.

Alasan keempat yaitu regionalisme sebagai mekanisme untuk *locking-in reforms*. Perjanjian perdagangan regional dapat memperkuat kredibilitas reformasi ekonomi domestik dan oleh karena itu meningkatkan daya tarik ekonomi negara tersebut terhadap investor asing. Pengaturan regional secara khusus dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kredibilitas komitmen ketika negara berkembang dan miskin memasuki kerjasama dengan negara industri, contohnya keikutsertaan Meksiko dalam NAFTA.

Alasan kelima yaitu regionalisme untuk memuaskan konstituensi domestik politik. Alasan keenam yaitu untuk memudahkan negosiasi dan implementasi perjanjian. Perjanjian regional dengan jumlah mitra yang kecil dapat memudahkan untuk negosiasi dan diimplementasikan daripada perjanjian di tingkat global.

Kategori alasan yang kedua adalah motivasi ekonomi dari regionalisme. Alasan yang pertama yaitu regionalisme memungkinkan untuk melindungi sektor yang tidak akan berhasil di kompetisi global. Alasan yang kedua yaitu regionalisme dapat memberikan kesempatan untuk terjadinya "*deeper integration*". Dijelaskan bahwa regionalisme menjadi pilihan yang lebih menarik bagi negara-negara yang pro pada liberalisasi karena regionalisme memberikan hal-hal yang tidak dapat WTO berikan, dikeranakan besar dan bervariasinya keanggotaan. Alasan yang ketiga yaitu regionalisme dapat menyediakan pasar yang lebih besar dan meningkatkan investasi asing. Jika dibandingkan dengan *status quo*, perjanjian ekonomi regional dapat menawarkan dua keuntungan utama dalam ekonomi, yaitu yang pertama perjanjian ekonomi regional menyediakan pasar yang lebih besar untuk industri domestik, memungkinkan mereka untuk dapat memproduksi lebih efisien dikarenakan skala ekonomi. Dan yang kedua bahwa regionalisme dapat meningkatkan daya tarik ekonomi terhadap investor potensial.

Begitu pula dengan kerja sama regional. Pada dasarnya, kerjasama regional merupakan bentuk saling ketergantungan yang diatur berdasarkan kedekatan geografis yang bias berkembang menjadi berbagai kepentingan bersama. Oleh karena itu, regionalisme merupakan tahap yang diperlukan masyarakat internasional dalam menuju globalisme yang di cita-citakan²⁴.

²⁴Sjamsumar Dam dan Riswandi, *Kerja Sama ASEAN*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), h. 17

Tahap-tahap kerjasama regional dan subregional biasanya dibagi kepada dua bagian: 1) tahap vertikal dan 2) tahap horisontal. Yang dimaksud dengan tahap vertikal adalah tiga tahap sebagai berikut:

1. Tahap kerjasama (*cooperation*), yang didalamnya negara-negara anggota masih belum dihadapkan kepada penyerahan kedaulatan apapun. Meskipun demikian dalam tahap ini sudah diperlukan kebulatan tekad dan kesungguhan niat untuk menuju cita-cita kerjasama regional serta perlu menyingkirkan hambatan intra regional serta rumusan bidang kerjasama.

2. Tahap koordinasi (*coordination*) di mana sudah diharuskan penyerahan sebagian dari kedaulatan demi mencapai tingkat interdependensi yang lebih tinggi dan lebih teratur. Koordinasi sama artinya dengan harmonisasi usaha-usaha nasional yang menyangkut kepentingan bersama seperti kebijaksanaan ekonomi, rencana pembangunan dan lainnya

3. Tahap integrasi (*integration*) merupakan tahap akhir dalam proses perkembangan kerjasama regional. Apabila suatu kerjasama regional telah sampai pada puncaknya, maka tahap itu disebut tahap integrasi, di mana negara-negara anggota telah menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada suatu badan supranasional yang mempunyai yuridiksi mengatur kepentingan bersama²⁵.

Adapun tahap horizontal adalah mencakup bidang ekonomi dan kebudayaan. Kedua bidang ini merupakan pilihan yang biasanya dijadikan starting

²⁵M. Sabir, *Politik Bebas Aktif*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1987), h.221-222.

point dalam pembentukan dan pertumbuhan sebuah kerjasama dan organisasi regional. Bahkan, seringkali kedua bidang tersebut dijadikan landasan utama bagi kerjasama yang dibangun. Mengingat kedua bidang inilah yang memiliki efek perbedaan dan sensitifitas yang lebih rendah dibanding bidang politik.

Begitu pula apa yang terjadi dikawasan Asia Tenggara saat ini, berbicara mengenai Regionalisme di Asia Tenggara, proses terbentuknya regionalisme negara-negara dikawasan Asia Tenggara didasari oleh adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah masalah bersama di Asia Tenggara. Dengan terbentuknya ASEAN akan memperkuat ikatan solidaritas, terciptanya perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan di antara negara-negara di Asia Tenggara. Proses Regionalisasi dalam ASEAN dapat terlihat dari terbentuknya *Asean Free Trade Area* (AFTA), yang mengarah kepada Integrasi ekonomi dalam perdagangan. AFTA adalah sebuah wujud dari kerjasama negara-negara ASEAN. Dengan adanya AFTA, negara-negara di kawasan ASEAN dapat dengan mudah melakukan kegiatan perdagangan Internasional-nya tanpa ada hambatan yang berarti. Sebagaimana fungsi dari perdagangan internasional, yaitu sebagai kunci pertumbuhan nasional bagi setiap negara, AFTA terlahir atas dasar tujuan akhir peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Proses Regionalisasi dalam ASEAN juga dapat terlihat dari pembentukan ASEAN Community 2015 yang bertujuan untuk menciptakan integrasi di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya.

ASEAN Community 2015 ini akan membuat batas antara negara anggota ASEAN semakin sempit dan juga semakin samar²⁶.

E. Metodologi penelitian

E1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif. Melalui metode ini akan digambarkan mengenai politik luar negeri Indonesia di ASEAN serta peranan Indonesia dalam mendorong proses transformasi ASEAN menjadi ASEAN community 2015. Dengan menggunakan metode ini, pembahasan dimulai dengan penggambaran selang pandang ASEAN yaitu penjabaran sejarah ASEAN serta proses pembentukan ASEAN Community 2015 serta peran Indonesia dalam proses transformasi perubahan ASEAN menjadi ASEAN Community 2015 yang menjadi regionalisme baru di dunia ketiga.

E2. Teknik Pengumpulan Data

Guna memahami serta menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan berupa telaah pustaka (*library research*).

²⁶<https://niasrs.wordpress.com/tag/regionalisme-asia-tenggara/> diakses pada tanggal: 07 Oktober 2015 pukul 19:15

Data diperoleh dari literatur-literatur mulai dari jurnal, buku, artikel majalah, surat kabar, dan bahan tertulis lainnya. Pengumpulan data juga dilakukan melalui data-data dari berbagai media elektronik baik radio, TV, dan internet yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menunjang dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun sumber literatur yang diperlukan untuk mengumpulkan data tersebut akan diperoleh melalui tempat-tempat sebagai berikut:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Jurnal- jurnal online serta artikel-artikel online.

E3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, berasal dari berbagai literatur dan sumber-sumber lain yang terkait. Data yang diperoleh akan dianalisa guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

E4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang akan peneliti pergunakan yakni analisa data kualitatif. Dimana peneliti akan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan data kualitatif tersebut. Peneliti bertujuan membuat penjelasan secara sistematis, faktual, akurat mengenai permasalahan yang diteliti melalui *library research*.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang : A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan penelitian, D. Kerangka dasar teori yang berisi : D1 Teori politik luar negeri, D2 teori regionalisme kawasan, E. Metodologi penelitian yang berisi : E1 Tipe penelitian, E2 Teknik Pengumpulan data, E3 Jenis data, E4 teknik analisa data, F Sistematika penulisan yang berisi : Bab 1 : pendahuluan, Bab 2 : gambaran umum ASEAN dan ASEAN Community, Bab 3 : Politik luar negeri Indonesia serta peranannya dalam proses transformasi ASEAN menjadi ASEAN community 2015, Bab 4 : Penutup serta saran dari penulis.

Bab II : Gambaran umum ASEAN dan ASEAN Community

Berisi tentang : A. Sejarah berdirinya ASEAN, B. Profil singkat ASEAN Community yang berisi : 1. Pengertian umum ASEAN Community, 2. *ASEAN Security Community (ASC)*, 3. *ASEAN Economic Community (AEC)*, 4. *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*

Bab III :Politik luar Negeri Indonesia Serta peranannya Dalam Proses Transformasi ASEAN Menjadi ASEAN Community 2015

Berisi tentang :A. Kebijakan Thousand friends Zero enemy dimasa Pemerintahan SBY , B. Kebijakan Tiga Pilar Utama ASEAN Community, C . Peran Regional Power Center

Bab IV :Penutup

Berisi tentang : A. Kesimpulan, B. Saran

